

# **Kewaspadaan Daerah dalam Menghadapi Potensi Radikalisme di Kalangan Pemuda Seiring dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia**

**Hana Nabila**

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan

Alamat email: hanabilamadjid@gmail.com

## **Abstract**

Indonesia government's plan to move the capital city to East Kalimantan encourages ideological, political, economic, social, cultural, defense, and security aspects to be considered, including the potential for radicalism to grow along with the migration of people. This research aims to provide a study on the vigilance of government and community elements in East Kalimantan to ward off radical movements especially in youth groups. This study uses qualitative descriptive methods. Interviews with speakers from various institutions in East Kalimantan Province who played a role in the efforts to counter the radicalism movement became the primary data source in this research. The results show that the local government's efforts by working along with academics, community forums, indigenous figures, religious leaders, and community leaders are at a preventive level. The early warning system is strengthened by intervening through educational facilities, promoting religious moderation on social media, empowering the local community through economic training, and strengthening local wisdom.

**Keywords:** Radicalism, Early Warning System, Youth, Capital of State.

## **Abstrak**

Rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur mendorong aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk diperhatikan, tak terkecuali potensi berkembangnya paham radikalisme seiring dengan migrasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian mengenai kewaspadaan elemen pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menangkal gerakan radikal khususnya pada kelompok pemuda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Wawancara dengan narasumber dari berbagai institusi di Provinsi Kalimantan Timur yang berperan dalam upaya penangkalan gerakan radikalisme menjadi sumber data primer dalam

penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya pemerintah dengan menggandeng akademisi, forum masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berada pada taraf preventif. *Early Warning System* diperkuat dengan melakukan intervensi di melalui sarana pendidikan, menggaungkan moderasi beragama di media sosial, pemberdayaan masyarakat lokal di bidang ekonomi, dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Radikalisme, *Early Warning System*, Pemuda, Ibu Kota Negara.

## A. Pendahuluan

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Adapun perspektif pemindahan ibu kota bukan untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, hiburan, dan jasa, melainkan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru ke luar Jakarta<sup>1</sup>, tepatnya Provinsi Kalimantan Timur. Pemerataan ekonomi disebut sebagai alasan utama dari pemindahan IKN. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya Brazil. Melansir pemberitaan Kompas<sup>2</sup>, Brazil memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dengan alasan membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. Hasilnya, setelah pemindahan ibukota, Brazil tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di Brasilia<sup>3</sup>.

Sebagai pusat pemerintahan, ibu kota negara baru harus dipersiapkan sedemikian rupa agar mampu menghadapi dua jenis ancaman, yakni ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia<sup>4</sup> yakni ancaman militer dari aktor negara yang bertujuan mengganggu, mengancam, atau merusak kesatuan serta kedaulatan negara. Adapun ancaman non-tradisional berupa ancaman dari aktor non-negara yang dapat berbentuk teror, perampokan, kriminalitas, radikalisme, penyelundupan obat-obatan terlarang dan lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara". Disampaikan pada Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: *Smart, Green, and Beautiful* oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 26 Juni 2019.

<sup>2</sup> Enny Sri Hartati, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara", Kompas, 27 Agustus 2019.

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Op.cit.

<sup>4</sup> Kementerian Pertahanan, "Buku Putih Pertahanan" (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Bappenas juga telah menentukan kriteria penentuan lokasi IKN. Pada aspek pertahanan dan keamanan setidaknya lokasi IKN harus memiliki potensi konflik sosial yang rendah serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Di samping itu, lokasi IKN juga harus memenuhi parameter pertahanan dan keamanan, yang mana dijelaskan sebagai (a) *to minimize vulnerability of state*; (b) *safeguard its territorial*; (c) *help to gain regional and international affairs*; dan (d) tidak dekat wilayah perbatasan negara<sup>5</sup>.

Menimbang kriteria tersebut, dengan resminya pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur yang dilanjutkan pada tahap pembangunan, kemudian membawa suatu diskursus terutama di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Provinsi Kalimantan Timur tepatnya sebelah barat diketahui berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Isu yang sejak lama menjadi perhatian di kawasan perbatasan selain menjadi jalan lalu-lalang tenaga kerja ilegal dan penyelundupan (*smuggling*), juga ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan yang berdampak pada munculnya ketegangan sosial akibat wilayah yang terisolasi sehingga kawasan ini menjadi jalan masuk bagi teroris (*transnational-terrorists*)<sup>6</sup>.

Tentu permasalahan keamanan daerah calon IKN menjadi sorotan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaannya. Prediksi Bappenas IKN akan dihuni oleh 1,5 juta penduduk. Meski terbilang tidak terlalu banyak, namun migrasi penduduk perlu diantisipasi sedemikian rupa. BAK<sup>7</sup> mengemukakan bahwa gelombang migrasi di Eropa membawa dampak terhadap ancaman terorisme, dimana gelombang migrasi dimanfaatkan oleh organisasi yang terafiliasi dengan gerakan terorisme untuk menyelundupkan anggota organisasinya ke Eropa untuk mempersiapkan serangan teror.

Salah satu alasan mengapa ibu kota harus pindah ke luar Jawa dikatakan karena penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga diperlukan

---

<sup>5</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Op.cit.

<sup>6</sup> The Partnership for Governance Reform, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/45239-ID-kebijakan-pengelolaan-kawasan-perbatasan.pdf>

<sup>7</sup> Tomasz Bąk, "The Wave of Migration in Europe as a Cause of Terrorist Threat", International Conference Knowledge-Based Organization 22. No. 1(2016).

pemerataan ke daerah-daerah lain yang memiliki jumlah penduduk rendah. Pulau Kalimantan tercatat dihuni hanya 6,05 persen penduduk Indonesia, sangat kontras dengan Pulau Jawa yang tercatat dihuni 16,56 persen dari total jumlah penduduk Indonesia<sup>8</sup>. Lantas kemudian, melalui pemindahan IKN diharapkan terjadi pemerataan penduduk dan mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Golongan pemuda, yang mana menurut ketentuan UU No. 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun, memainkan peranan penting dalam upaya menentukan arah bangsa. Orang muda atau pemuda merupakan aktor kunci pada sebagian besar perubahan ekonomi dan sosial. Urbanisasi dan de-agranisasi (pergeseran sektoral dalam pekerjaan) di Indonesia sedikit banyak diperankan oleh kaum muda<sup>9</sup>. Ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan dalam keberhasilan pemindahan IKN dengan prediksi bertambahnya jumlah pemuda di Kalimantan Timur. Peluangnya, produktivitas pemuda yang kian ditunjang dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mumpuni dewasa ini akan membawa pembangunan ke arah positif. Di lain sisi, tantangan peran pemuda juga dihadapkan pada fakta keterlibatan pemuda dalam aksi intoleransi dan radikalisme agama. Kaum muda atau pemuda Indonesia masih bermasalah dengan hal yang bersifat rekognisi sosial, dimana masih banyak paham yang menolak hidup berdampingan dengan keragaman agama dan aliran keyakinan. Di samping itu, pemuda dengan mudah tersusupi paham radikal melalui pemahamannya bahwa terdapat masalah pada negara dan bangsanya, kepemimpinan khalifah kemudian dianggap sebagai jalan keluar penyelesaian masalah tersebut<sup>10</sup>. Persoalan ekonomi, politik, mentalitas, agama, dan kultural menjadi faktor penting yang turut memumpuk radikalisme<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Op.cit.

<sup>9</sup> Suzanne Naafs dan Ben White, "Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia", dalam Jurnal Pemuda 1, No.2 (2012).

<sup>10</sup> Bagong Suyanto, Mun'im Sirry & Rahma Sugihartati, "*Pseudo-Radicalism and the De-Radicalization of Educated Youth in Indonesia*", dalam Studies in Conflict & Terrorism

<sup>11</sup> Zuly Qodir, "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama" dalam Jurnal Studi Pemuda 5, No. 1 (2016): 432

Keterlibatan pemuda dalam gerakan radikalisme agama tidak serta merta bisa dipukul rata. Namun setidaknya, fenomena “pseudo-radicalists” –kelompok pelajar yang terpapar ideologi radikal– telah berkembang di Indonesia. Riset yang dilakukan pada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat segmentasi mahasiswa yang aktif dalam studi khalifah, beberapa di antaranya juga telah bergabung dalam organisasi yang terafiliasi dengan Syiria untuk melaksanakan *jihad* yang dipahaminya<sup>12</sup>. Melalui kedua riset tersebut, kemudian dipahami bahwa golongan pemuda, baik berpendidikan tinggi maupun rendah, memiliki resiko yang sama terhadap paparan ideologi radikal.

Mempersiapkan seluruh elemen ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam rangka pemindahan IKN tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, namun juga seluruh pihak mulai dari akademisi sampai dengan masyarakat di akar rumput memiliki peran yang besar. Tulisan ini akan mengulas kewaspadaan daerah dalam menghadapi potensi radikalisme pada golongan pemuda seiring dengan pemindahan IKN. Kewaspadaan daerah akan ditinjau melalui kondisi perdamaian dan keamanan di Provinsi Kalimantan Timur, ideologi pemuda sebagai penentu arah bangsa, dan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman gerakan radikal.

## **1. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan sumber data skunder melalui kajian literasi, penelusuran dokumen terkait, hingga pemberitaan di media. Triangulasi data dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bertemu dengan beberapa pihak yang terlibat dalam fungsi pengawasan gerakan kontra ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya gerakan radikal agama. Narasumber yang ditemui di antaranya adalah representatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti juga

---

<sup>12</sup> Bagong Suyanto, Mun'im Sirry & Rahma Sugihartati, Op.cit.

menemui akademisi dari Universitas Mulawarman sebagai penyeimbang dalam pengumpulan data terkait topik ini.

## **B. Kondisi Keamanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Calon Ibu Kota Negara Baru**

Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur tentu menjadi salah satu perhatian mengingat desai tata kota pada IKN harus berbasis pada pertahanan negara. Dimana aspek pertahanan dan keamanan negara (*security approach*) juga penting disamping aspek kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (*prosperity approach*)<sup>13</sup>. Terlebih, rencana pemerintah untuk menjadikan IKN baru sebagai pusat pemerintahan. Provinsi Kalimantan Timur tepatnya sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi kantor-kantor strategis kepala negara, kepala pemerintahan, hingga pimpinan lembaga negara akan dilakukan. Oleh sebabnya, perlu memperhatikan perpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pembangunan dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertahanan Negara.

.Wilayah Kalimantan Timur yang secara geografis berdekatan dengan Filipina juga menjadi perhatian pemangku kepentingan. Terdapat beberapa titik rawan konflik dan kejahatan laut di wilayah perairan sebelah utara Indonesia ini. Wilayah perairan ini menjadi salah satu jalur masuk kelompok pemberontak maupun kelompok terafiliasi dengan jaringan teroris internasional<sup>14</sup>. Hal ini juga dikuatkan melalui pernyataan FKPT Kaltim, Bakesbangpol Kaltim, maupun Polda Kaltim bahwa pihak daerah dan pusat memberikan perhatian khusus pada jalur-jalur rawan penyusupan kelompok radikal tersebut. Terlebih, Provinsi Kalimantan Timur pernah tercatat sebagai zona merah (*red zone*) bersama dengan Kota Palu dan Surabaya dalam hal keaktifan pergerakan kelompok teroris. Berdasarkan pemaparan Ketua FKPT Provinsi Kalimantan Timur, setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi alasan mengapa Kalimantan Timur menjadi zona merah gerakan radikal-terorisme, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Agus Sudibyo dan Udaya Madjid, "Kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 45, NO. 2 (2019):182

<sup>14</sup> Ibid, 183.

- 1) Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan jalur air yang strategis, baik laut maupun sungai. Di samping itu, akses melalui jalan darat atau disebut “jalur tikus” juga banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kepala FKPT Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan, oknum kelompok teroris dari Filipina masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Meskipun perbatasan bergeser seiring pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, jalur-jalur akses darat maupun air ini masih dinilai strategis bagi kelompok tertentu keluar dan masuk ke wilayah Indonesia.
- 2) Beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terpantau strategis bagi para simpatisan gerakan radikal-terorisme. Melalui penuturan Kepala FKPT Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa kejadian Bom Bali I dan II pada tahun 2002 dan 2005 melibatkan simpatisan yang sempat singgah di Kalimantan Timur.
- 3) Terdapat 16 eks narapidana terorisme (napiter), meski bukan pelaku langsung, simpatisan pendukung gerakan terorisme ini tercatat di Provinsi Kalimantan Timur.

Meski secara geografis Kalimantan Timur terhitung rawan terhadap masuknya gerakan kontra ideologi Pancasila, secara sosiologis justru menunjukkan situasi yang menguntungkan. Provinsi Kalimantan Timur dikenal dengan keragamannya, terutama dengan banyaknya masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kerukunan antar etnis, antar umat beragama, dan antar kelompok masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dinilai relatif terjaga dengan baik. Indikator penilaian tersebut dilihat melalui rendahnya angka konflik, kekerasan, dan kerusuhan sosial di wilayah Kalimantan Timur<sup>15</sup>.

Faktor pendukung pada aspek sosiologis masyarakat Kalimantan Timur juga diamini oleh Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar agama cukup tinggi. Namun, meski begitu, penguatan nilai-nilai toleransi terus ditingkatkan bahkan dari lingkup tempat tinggal (desa dan dusun) hingga pada perangkat pemerintah daerah itu sendiri. Gempuran teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses

---

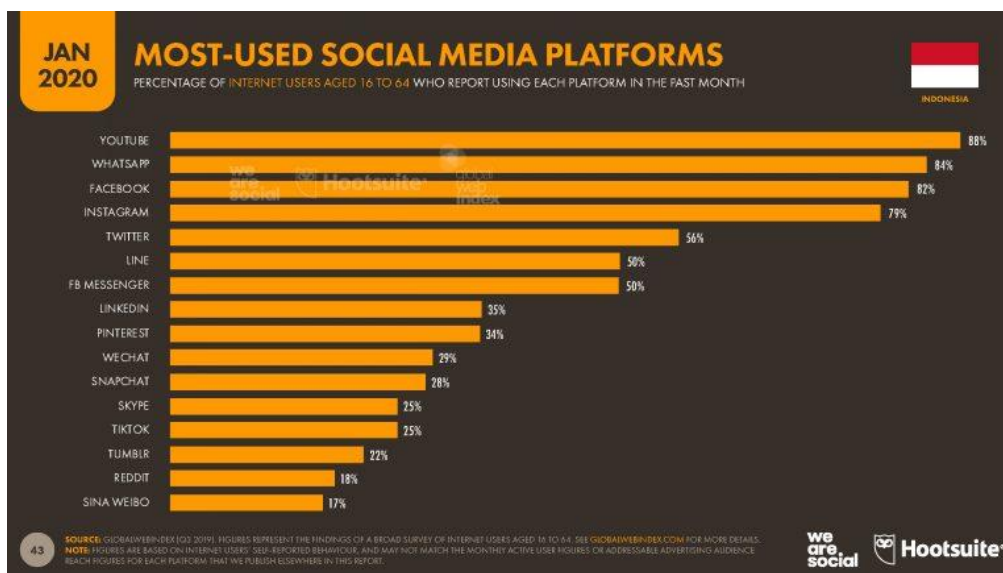
<sup>15</sup> Ibid, 183.

informasi secara luas dan bebas, membuka peluang menguatnya konservatisme agama yang dapat menjadi bibit intoleransi.

### C. Moderasi Beragama di Media Sosial

Penggunaan media sosial di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2020, pengguna media sosial aktif di Indonesia sejumlah 160 juta orang atau penetrasinya mencapai 59 persen total populasi di Indonesia. Adapun *platform* yang paling aktif digunakan adalah Youtube, disusul Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Twitter<sup>16</sup>. Sifat media sosial yang ekspresif, memungkinkan penggunanya untuk berbagi dan menerima berbagai hal seperti dukungan spiritual, mengekspresikan keyakinan seseorang, hingga menginformasikan pemahaman keagamaan. Media sosial, kini menjadi wadah bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhannya, media sosial menyediakan akses bagi seseorang untuk memenuhi gairah keagamaan yang dapat diekspresikan secara *online*<sup>17</sup>. Pasar terbesar media sosial adalah kaum muda dengan persentase 77 persen. Kaum mudalah yang kemudian paling memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar agama<sup>18</sup>.

Gambar 1.1 Persentase Media Sosial Paling Aktif Digunakan di Indonesia



Sumber: Hootsuite (We are Social). 2020. *Indonesian Digital Report 2020*. Diakses melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.

<sup>16</sup> Hootsuite (We are Social). "Indonesian Digital Report 2020", <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.

<sup>17</sup> Pamela Jo Brubaker<sup>1</sup> and Michel M. Haigh, "The Religious Facebook Experience: Uses and Gratifications of Faith-Based Content", *Social Media + Society*,1, No. 11 (2017).

<sup>18</sup> Zuly Qodir, Op.cit. 434.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) dalam risetnya yang berjudul “Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia”, mencatat bahwa narasi konservatif muncul di media sosial dalam banyak isu, utamanya gender dan agama. Narasi keagamaan konservatif di media sosial tercatat sebanyak 67 persen, sedangkan moderat 22,2 persen, liberal 6,1 persen dan islamis 4,5 persen<sup>19</sup>. Temuan ini mengindikasikan bahwa dominasi konservatif di media sosial terjadi lantaran aktor sentral dalam narasi keagamaan dikuasai oleh pengguna akun yang memiliki kecenderungan paham konservatif. Lain halnya dengan akun yang berpandangan moderat yang cenderung pasif dalam mengekspresikan pandangannya. Fenomena ini kemudian dikenal dengan apa yang dinamakan *noisy minority*, dimana minoritas lebih aktif, kebalikan dari *silent majority*. Meski pada kenyataannya proporsi paham moderat lebih besar dibanding islamis dan konservatif, namun terkalahkan oleh gaung konservatif yang lebih kuat di media sosial.

Moderasi beragama di media sosial kini menjadi hal yang diperhatikan oleh banyak pihak. Konservatisme hari ini bagai pedang bermata dua, menjadi sumber optimisme sekaligus kecemasan. Kesalihan dan ketaatan beribadah sesuai ajaran agama merupakan suatu kebajikan. Namun, apabila konservatisme dibiarkan menjadi tertutup dan eksklusif maka dipercaya menjadi pintu intoleransi yang berbuntut radikalisme. Di lapangan, konservatisme menjamur melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemuda seperti pengajian rutin di sekolah, Kajian yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Wahid Foundation menemukan bahwa sejumlah siswa sekolah menengah atas hingga mahasiswa mendukung konsep negara khilafah<sup>20</sup>.

*Stakeholder* di Kalimantan Timur pun mengamini kecemasan penggunaan media sosial guna membuat propaganda paham konservatif maupun radikal. Ketua FKPT Kaltim mengatakan, bahwa tren glorifikasi jihad di kalangan pemuda terus meningkat terutama setelah penetrasi media sosial semakin luas. Paham radikalisme tidak hanya mengancam kelompok pemuda dengan tingkat pendidikan rendah,

---

<sup>19</sup> PPM UIN Jakarta, “Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia”, Merit Report 2020 1, No. 1 (2020): 18.

<sup>20</sup> Majalah Tempo, “Manfaat dan Bahaya Konservatisme Agama”, edisi 19 Juni 2017, <https://majalah.tempo.co/read/opini/153386/manfaat-dan-bahaya-konservatisme-agama>.

namun juga mengancam pemuda-pemudi berpendidikan tinggi, bahkan lulusan perguruan tinggi negeri.

Meski berdasarkan data FKPT Kaltim masyarakat Kalimantan Timur tidak banyak yang bergabung sebagai pelaku terorisme, namun umumnya banyak tercatat sebagai simpatisan yang pro terhadap paham radikalisme. Salah satu faktor yang mendorong menjamurnya simpatisan adalah penggunaan media sosial yang semakin terbuka, *framing* yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu terhadap gerakan jihad memunculkan *image* baik kelompok tersebut, selanjutnya menarik simpati orang-orang tertentu. Meski tak sepenuhnya didasari melalui doktrin di media sosial, melainkan melibatkan faktor lain seperti ekonomi dan politik<sup>21</sup>. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakan moderasi dalam beragama, seperti memperbanyak konten mengenai kerukunan dan toleransi antar umat beragama, serta penguatan bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian.

#### **D. Kesiapan Daerah dalam Menanggulangi Ancaman Gerakan Radikal**

Pemerintah bersama dengan aparat pertahanan dan keamanan, serta masyarakat sipil terus berupaya untuk menanggulangi gerakan radikal yang berpotensi terhadap ancaman terorisme. Sejak tahun 2019, berdasarkan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui FKPT Kaltim, Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi zona hijau terorisme. Meski begitu, langkah preventif terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai cara di antaranya melalui pendidikan dan penguatan ideologi Pancasila, kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh forum kemasyarakatan, hingga penguatan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat.

##### **1. Pendidikan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila**

Tren penguatan intoleransi hingga radikalisme-terorisme pada kaum muda seiring dengan kebebasan akses terhadap media sosial, telah menjadi perhatian dunia pendidikan. Tim persiapan pemindahan IKN melibatkan akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Akademisi Universitas Mulawarman, sebagai salah satu perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur turut bersinergi dalam persiapan pemindahan IKN pada berbagai aspek, salah satu di antaranya pada aspek ideologi.

---

<sup>21</sup> Chuck Crossett and Jason A. Spitaletta, "*Radicalization: Relevant Psychological and Sociological Concepts*", Technical Report Fort Meade, MD: Asymmetric Warfare Group (2010): 10.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ancaman radikalisme-terorisme pada pemuda yakni melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dapat berupa jalur formal maupun informal. Universitas Mulawarman melalui Badan Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan secara aktif melakukan upaya penguatan ideologi Pancasila dan pendidikan karakter. Dr. Suryaningsi S.Pd, M.H. selaku akademisi dari Universitas Mulawarman mengungkapkan bahwa giat yang dilakukan sebagai upaya penguatan ideologi Pancasila berupa sosialisasi dan juga *workshop* bertemakan pendidikan kewarganegaraan yang kerap digelar bekerjasama dengan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai bidang untuk saling berdiskusi mengenai ideologi dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat luas.

Intervensi melalui jalur pendidikan juga dilakukan pemerintah melalui Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bersama akademisi dari universitas di Wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut berupa aktivitas sosialisasi dan *monitoring* di beberapa sekolah menengah atas. Beberapa studi membuktikan bahwa kelompok ekstrimis telah membangun jaringan untuk merekrut simpatisan melalui sekolah dan perguruan tinggi<sup>22</sup>. Di Indonesia, fenomena *pseude-radicalism* ditemui di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Mahasiswa di PTN sebagian besar terpapar paham radikal ketika memasuki perguruan tinggi, namun tidak sedikit yang juga telah terpapar sejak di bangku SMA<sup>23</sup>. Oleh sebabnya Bakesbangpol bersama akademisi perguruan tinggi memfokuskan kegiatan di sekolah setingkat SMA di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Target dari kegiatan tersebut tidak hanya siswa sekolah namun juga guru agar memperhatikan kegiatan-kegiatan di luar kelas yang rawan disusupi oleh paham radikalisme maupun ekstrimisme. Potret di lapangan menangkap, 40 persen siswa SMA responden survei The Wahid Institute yang aktif mengikuti ekstrakurikuler Islam atau dikenal sebagai Rohis mengaku bahwa mereka mendukung Indonesia menjadi negara Islam di bawah kepemimpinan khilafah,

---

<sup>22</sup> British House of Commons, "Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005" (The Stationery Office: London, UK, 2006).

<sup>23</sup> Bagong Suyanto, Mun'im Sirry & Rahma Sugihartati, Op.cit.

serta 60 persen responden siap untuk berjihad di wilayah konflik apabila ada kesempatan<sup>24</sup>.

## **2. Kegiatan Forum Masyarakat**

Langkah preventif dalam menanggulangi ancaman radikalisme terus diperbaharui seiring dengan perkembangan jaman. BNPT melalui FKPT di tingkat provinsi, termasuk Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi program Duta Damai Dunia Maya. Yakni kelompok anak muda yang mewakili daerah masing-masing untuk memelihara iklim damai di dunia maya dengan cara memproduksi dan menyebarkan konten-konten positif. Konten yang dimaksud sesuai fakta. Jujur, dan berorientasi pada kepentingan bersama serta keutuhan dan persatuan NKRI. Kegiatan yang berkaitan dengan Duta Damai Dunia Maya Kaltim juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari akademisi hingga tokoh masyarakat di Kalimantan Timur.

Upaya lain yang dilakukan oleh forum kemasyarakatan ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pernyataan Kepala FKUB Kaltim, saat ini FKUB Kaltim melakukan pembinaan kepada masyarakat utamanya pemuda di dua desa di Kota Samarinda. Desa tersebut dinamai Desa Sadar Kerukunan dan Kampung Toleransi. Keterlibatan tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, dan tokoh agama diperkuat dalam program ini. Sebagai langkah preventif, FKUB bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama melakukan pembinaan dan pelatihan untuk memperkuat sinergi masyarakat desa. Program yang dilakukan diantaranya penguatan ekonomi seperti pelatihan wirausaha, pengolahan sampah menjadi barang bernilai jual, yakni belikat batubara. Pendekatan perekonomian dilakukan agar muncul rasa percaya antara masyarakat dengan institusi yang erat dengan pemerintahan, sehingga penetrasi nilai-nilai ideologi bisa mudah diterima. Melalui kegiatan pemberdayaan ini diharapkan tercipta kerukunan, memperkecil jarak akibat perbedaan, rasa toleransi sehingga masyarakat desa bisa bersama-sama saling jaga dan waspada apabila ada warga yang terindikasi terpapar paham radikalisme-

---

<sup>24</sup>Muhammad Nurul Huda, "Intolerance Among Youth During The Rise of The Muslim Middle Class in Urban Areas", (Wahid Foundation, 2017)  
[http://wahidfoundation.org/source/publication/Intolerance\\_Among\\_Youth\\_During\\_The\\_Rise\\_of\\_The\\_Muslim\\_Middle\\_Class\\_in\\_Urban\\_Areas.pdf](http://wahidfoundation.org/source/publication/Intolerance_Among_Youth_During_The_Rise_of_The_Muslim_Middle_Class_in_Urban_Areas.pdf)

terorisme. Upaya ini juga merupakan bentuk perwujudan *early warning system* terhadap gerakan-gerakan kontra ideologi Pancasila.

### **3. Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal**

Secara sosiologis, resistensi masyarakat Kalimantan Timur terhadap pendatang rendah karena jauh sebelum rencana IKN dipindahkan, telah bermukim masyarakat dari berbagai daerah. Penduduk asli dan pendatang terbilang cukup harmonis sehingga tercipta integrasi masyarakat<sup>25</sup>. Meski begitu, kearifan lokal setempat harus terus dibumikan. Pada dasarnya, kearifan lokal adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang diimplementasikan melalui perilaku, cara pandang, dan keseharian masyarakat dalam memanfaatkan sumber lokal (materil maupun non materil) yang ditujukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik<sup>26</sup>. Kearifan lokal yang syarat akan nilai-nilai leluhur terbukti berkontribusi dalam membangun perdamaian di berbagai daerah di Indonesia<sup>27</sup>. Seperti ungkapan *Baku Bae* di Maluku yang artinya saling berbaikan, kemudian menjadi sebuah gerakan perdamaian yang sukses pasca konflik Ambon tahun 1999<sup>28</sup>. dan Sebab, pada dasarnya, gerakan radikalisme, ekstrimisme, hingga terorisme dekat dengan konflik di masyarakat, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Nilai-nilai perdamaian melalui pengamalan kearifan lokal perlu digaungkan untuk mengurangi potensi konflik yang bisa menjadi pintu masuk gerakan kontra ideologi Pancasila.

BNPT melalui risetnya pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu faktor utama yang paling berpengaruh setelah diseminasi media sosial<sup>29</sup>. Melalui pemahaman bersama terhadap nilai luhur yang berbeda di masing-masing daerah, akan menjadi perekat masyarakat yang dapat menjadi jaring pengaman dari paham radikal. Meski begitu, perlu kajian lebih lanjut terhadap nilai-nilai kearifan lokal di masing-masing daerah yang notabeneanya berbeda satu sama

---

<sup>25</sup> Agus Sudibyo, Op.cit, 183.

<sup>26</sup> Ahmad Jubaidi, Nanik Pujiastuti, Salasiah, "Pencegahan Paham Terorisme dan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Timur", dalam *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1 No. 1 (2018): 2.

<sup>27</sup> Nuryani Siti Darisma, I Wayan Midhio, Triyoga Budi Prasetyo, "Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai di Giyanti, Wonosobo", dalam *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 4, No. 1 (2018).

<sup>28</sup> Ichsan Malik, "Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian", (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2017).

<sup>29</sup> Koran Tempo, "Survei: Kearifan Lokal Mampu Menangkal Radikalisme", edisi 11 Desember 2019 <https://koran.tempo.co/read/nasional/448337/survei-kearifan-lokal-mampu-menangkal-radikalisme?read=true>

lain agar efektif dalam membangun perdamaian dan menangkal paham radikal dan kontra ideologi Pancasila.

Salah satu nilai yang digaungkan di wilayah Kalimantan Timur adalah *buen kesong*, yang artinya berhati baik. Makna yang luas dari ungkapan *buen kesong* ini menurut Ketua FKUB Kaltim maupun Ketua FKPT Kaltim dapat dipahami berbagai macam kebaikan. Kebaikan yang dimaksud diamini sebagai bentuk tenggang rasa, toleransi, dan saling menghormati terhadap perbedaan suku, ras, dan agama masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Selain *buen kesong*, terdapat banyak ungkapan yang mengartikan kebaikan di wilayah Kalimantan Timur, di antaranya:

- *Odah etam* yang berarti kita bersama.
- *Murip ngenai* yang berarti makmur sejahtera bersama. Biasanya disandingkan dengan ungkapan *te ang hray* yang berarti tinggal bersama, kompetisi yang sehat.
- *Menyisir sisi tapih* yang berarti introspeksi diri<sup>30</sup>.

Melalui pemahaman mendalam tentang ungkapan-ungkapan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, akan tercipta keharmonisan sosial, menuju masyarakat yang rukun dan damai.

## **E. Kesimpulan**

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur memerlukan persiapan di berbagai aspek di antaranya ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Meski wilayah Kalimantan Timur tercatat sebagai zona hijau ancaman terorisme, wilayah Kalimantan Timur pernah memiliki sejarah sebagai zona merah bersama Kota Surabaya dan Kota Palu mengingat secara geografis letak Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi akses masuk baik melalui jalur perairan maupun darat. Oleh sebabnya penting bagi seluruh tatanan pemerintah maupun masyarakat di Kalimantan Timur untuk bersinergi membangun jaring pengaman daerah dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman kontra ideologi Pancasila, radikalisme, maupun terorisme.

---

<sup>30</sup> H. Ahmad Jubaidi, Hj. Nanik Pujiastuti, Salasiah, Op.cit, 3.

Pemuda sebagai ujung tombak masa depan negara berperan penting dalam hal penanggulangan paham radikal, di sisi lain pemuda juga menjadi ancaman ke dalam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ideologi mendorong seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk tidak terjebak dalam sisi negatif yang dibawa teknologi, salah satunya penggunaan media sosial sebagai media diseminasi paham radikal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama dengan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat umum bersinergi dalam rangka menganggulangi ancaman paham radikal berkembang di calon ibu kota negara. Upaya yang dilakukan setidaknya meliputi koordinasi aparat pertahanan, aparat keamanan, dan elemen masyarakat untuk memetakan potensi gerakan radikal. Upaya preventif yang dilakukan daerah meliputi intervensi pendidikan melalui sosialisasi, pembangunan karakter, dan penguatan ideologi Pancasila. Kemudian upaya lainnya yang didukung oleh forum kemasyarakatan di antaranya adalah pengembangan ekonomi, diseminasi informasi kontra radikalisme melalui Duta Damai Dunia Maya, serta pemetaan bekerjasama dengan aparat pertahanan dan keamanan.

Rumusan lainnya yang diusung dalam upaya penanggulangan ancaman radikalisme pada pemuda yakni melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Mengingat migrasi penduduk akan meningkat seiring pemindahan IKN, maka perlu membumikan nilai-nilai kebaikan dari leluhur setempat seperti ungkapan *buen kesong* yang berarti berhati baik agar tercipta integrasi sosial dan keharmonisan antara penduduk asli dan pendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bąk, Tomasz. (2016). *The Wave of Migration in Europe as a Cause of Terrorist Threat*. International Conference Knowledge-Based Organization. 22. 1-9. 10.1515/kbo-2016-0001.
- British House of Commons. (2006). *Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005*. London: The Stationery Office.
- Brubaker, P. J., & Haigh, M. M. (2017). *The Religious Facebook Experience: Uses and Gratifications of Faith-Based Content*. *Social Media + Society*, 3(2), 205630511770372. doi:10.1177/2056305117703723

- Crossett, C., Spitaletta J.A., (2010). *Radicalization: Relevant Psychological and Sociological Concepts*. Technical Report Fort Meade, MD: Asymmetric Warfare Group.
- Darisma N. S., Midhio I. W., Prasetyo T. B. (2018). *Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai di Giyanti, Wonosobo*. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik 4(1).
- Hartati, Enny Sri. (2019). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Dalam Kompas edisi 27 Agustus 2019.
- Hootsuite (We are Social). (2020). *Indonesian Digital Report 2020*. Diakses melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.
- Huda, M. N. (2017). *Intolerance Among Youth During The Rise of The Muslim Middle Class in Urban Areas*. Jakarta: Wahid Foundation. [http://wahidfoundation.org/source/publication/Intolerance\\_Among\\_Youth\\_During\\_The\\_Rise\\_of\\_The\\_Muslim\\_Middle\\_Class\\_in\\_Urban\\_Areas.pdf](http://wahidfoundation.org/source/publication/Intolerance_Among_Youth_During_The_Rise_of_The_Muslim_Middle_Class_in_Urban_Areas.pdf)
- Jubaidi A., Pujiastuti N., Salasiah. (2018). *Pencegahan Paham Terorisme dan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Timur*. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1(1).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*. Paparan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful, 26 Juni 2019.
- Kementerian Pertahanan. (2016). *Buku Putih Pertahanan*. Kemhan RI.
- Koran Tempo. Edisi 11 Desember 2019. *Survei: Kearifan Lokal Mampu Menangkal Radikalisme*. <https://koran.tempo.co/read/nasional/448337/survei-kearifan-lokal-mampu-menangkal-radikalisme?read=true>.
- Majalah Tempo. Edisi 19 Juni 2017. *Manfaat dan Bahaya Konservatisme Agama*. Diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/opini/153386/manfaat-dan-bahaya-konservatisme-agama>.
- Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Naafs, S., White, B. (2012). *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia*. Jurnal Pemuda 1(2).
- PPM UIN Jakarta. (2020). *Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia*. Merit Report 2020 1(1).
- Qodir, Zuly. (2016). *Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*. Jurnal Studi Pemuda 5(1).
- Suyanto, B., Sirry, M., Sugihartati, M. (2019). *Pseudo-Radicalism and the De-Radicalization of Educated Youth in Indonesia*. Studies in Conflict & Terrorism, DOI: 10.1080/1057610X.2019.1654726.
- The Partnership for Governance Reform. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/45239-ID-kebijakan-pengelolaan-kawasan-perbatasan.pdf>.